

PERANAN MATA KULIAH PENDIDIKAN HUKUM DAN HAM DALAM MEWUJUDKAN KEPATUHAN HUKUM

¹Dzykra Salsabila, ²Henni Muchtar, ³Junaidi Indrawadi, ⁴Yusnanik Bakhtiar

^{1,2,3,4}Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Falkultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Co-Author: Henni Muchtar

E-mail: hennimuchtar@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan mata kuliah Pendidikan Hukum dan HAM dalam mewujudkan kepatuhan hukum pada peminjaman buku pustaka Universitas Negeri Padang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa Prodi PPKn tidak mematuhi regulasi hukum perpustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menjawab hipotesis. Teknik analisis data pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara mata kuliah pendidikan hukum dan HAM memiliki peranan terhadap pembentukan kepatuhan hukum mahasiswa Prodi PPKn Universitas Negeri Padang. Dengan koefisien determinasi (*R-Square*) sebesar 0,203 mata kuliah Pendidikan Hukum dan HAM berkontribusi sebesar 20,3% terhadap kepatuhan hukum. Adapun faktor penyebab mahasiswa Prodi PPKn Universitas Negeri Padang tidak patuh akan regulasi hukum perpustakaan UNP yaitu faktor internal dari pemustaka dan faktor eksternal yaitu perpustakaan itu sendiri.

Kata Kunci: Pendidikan Hukum dan HAM, kepatuhan hukum, perpustakaan

ABSTRACT

This research aims to determine the role of Law and Human Rights Education courses in realizing legal compliance in borrowing library books at Padang State University, as well as identifying the factors that cause PPKn Study Program students to not comply with library legal regulations. This research uses a mixed quantitative and qualitative approach. Simple linear regression analysis is used to answer the hypothesis. Data analysis techniques for data collection, data reduction, data presentation, and data verification. The results of this research show that the relationship between legal education courses and human rights plays a role in the formation of legal compliance in students of the PPKn Study Program at Padang State University. With a coefficient of determination (*R-Square*) of 0.203, Law and Human Rights Education courses contribute 20.3% to legal compliance. The factors that cause Padang State University Civics Study Program students not to comply with UNP library legal regulations are internal factors from the library users and external factors, namely the library itself.

Keywords: Legal and Human Rights Education, legal compliance, library



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2024 by author.

PENDAHULUAN

Mahasiswa di dunia akademik tidak lepas dari aturan yang ada, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan aturan tersebut harus dipatuhi sepenuhnya oleh mahasiswa, tanpa terkecuali. Pada kenyataannya masih banyak mahasiswa yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan pihak universitas seperti terlambat mengembalikan buku dari perpustakaan. Kepatuhan hukum erat kaitannya dengan kewajiban untuk mematuhi peraturan yang ada karena adanya sanksi, sehingga seseorang yang mengikuti peraturan tersebut takut akan sanksi". (Sudjana, 2016). Di Universitas Negeri Padang kehidupan perkuliahan diatur berdasarkan putusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor: 03.4/UN35/KP/2019 terkait Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Universitas Negeri Padang Terkait BAB II Pasal 2 Mengenai Hak Mahasiswa dan Pasal 3 Mengenai Kewajiban Mahasiswa. Berdasarkan putusan Rektor mengenai Tata Tertib Pemanfaatan Jasa Layanan Perpustakaan UNP Nomor 4136/UN35/PK2017. Di Universitas Negeri Padang mahasiswa PPKn ada yang melanggar aturan yang sudah jelas regulasinya dengan rincian sebagai berikut:

No	Inisial/Angkatan	Buku Yang Dipinjam	Denda
1	N (2018)	Psikologi Pendidikan, Psikologi Belajar, Psikologi pendidikan Edisi Kedua	Rp. 3.000.000
2	ADP (2019)	Metode Penelitian, Metode Penelitian Mix Methods	Rp. 142.000
3	FSA (2017)	Hukum Acara Perdata	Rp. 1.395.000
4	FDS (2019)	Pengantar Ilmu Hukum, Sistem Politik Indonesia	Rp. 1.000.000
5	SLF (2018)	Ilmu Politik, Pengantar Hukum	Rp. 2.700.000
6	FIM (2019)	Pengantar Ilmu Hukum	Rp. 500.000
7	N (2018)	Pengantar Hukum	Rp. 1.200.000
8	AT (2019)	Sistem Politik Indonesia	Rp. 1.000.000

Tabel 1. Mahasiswa PPKn yang melanggar Kewajibannya sebagai anggota biasa perpustakaan UNP Januari – Februari 2023.

(Sumber Data: Perpustakaan UNP).

Dalam dunia pendidikan, perguruan tinggi merupakan pondasi moral, etika dan kepatuhan hukum di perguruan tinggi. Universitas merupakan salah satu lembaga pendidikan yang bertugas membentuk karakter dan kepribadian mahasiswa. Universitas merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang diinginkan. Salah satu mata kuliah yang bertujuan untuk melatih mahasiswa menjadi warga negara yang baik dan taat hukum adalah Pendidikan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ruang lingkup pendidikan hak asasi manusia dan hukum dilaksanakan dalam Standar Kecakapan Mata Pelajaran di Prodi PPKn Universitas Negeri Padang.

Capaian Prodi PPKn Universitas Negeri Padang pada mata kuliah Pendidikan Hukum dan HAM yaitu mahasiswa mampu menguasai, menerapkan konsep teoritis,

prinsip, metode keilmuan dan *ocialus* PPKn. Melalui mata kuliah Pendidikan Hukum dan HAM mahasiswa mampu memahami manfaat dasar ilmu hukum, khususnya ilmu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat dan antara individu dengan negara mengetahui antara tuntutan hak dan kewajiban negara. Penelitian-penelitian tentang pendidikan hukum dan HAM seperti yang dilakukan oleh Opeska (2021) tentang pengaruh pendidikan hukum dan budaya hukum terhadap kepatuhan hukum warga Kota Jambi menunjukkan bahwa pendidikan hukum dan budaya hukum memiliki pengaruh rendah terhadap kepatuhan hukum warga kota Jambi. Hasil regresi berganda menunjukkan bahwa 0,000 kurang dari 0,05, dengan R Square 0,147, atau 14,7%. Angraini, Dkk (2018) yang meneliti tentang peningkatan kepatuhan hukum melalui pembelajaran Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi. Kepatuhan hukum akan meningkat jika semua elemen kesadaran hukum terpenuhi, yaitu pengetahuan tentang peraturan hukum, pemahaman tentang isi peraturan hukum yang berlaku, persepsi terhadap peraturan hukum, dan perilaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu ada atau tidaknya peranan matakuliah Pendidikan Hukum dan HAM dalam mewujudkan kepatuhan hukum mahasiswa Prodi PPKn Universitas Negeri Padang dan mengidentifikasi faktor penyebab mahasiswa Prodi PPKn Universitas Negeri Padang tidak patuh akan regulasi hukum perpustakaan. Penelitian ini bermanfaat untuk dapat menjadi rujukan mahasiswa untuk mengoptimalkan pengetahuan, keterampilan yang didapatkan dari mata kuliah Pendidikan Hukum dan HAM agar sejalan dengan aturan kehidupan mahasiswa. Serta dapat menjadi rujukan untuk mengetahui kelemahan pelayanan/fasilitas yang ada di Universitas Negeri Padang dan meningkatkan sanksi yang tegas agar menghasilkan mahasiswa yang patuh hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Metode campuran (*Mixed Method*) yang menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung oleh pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Prodi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang JL. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Kec. Padang Utara Kota Padang. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan Teknik *purposive sampling*. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah dosen pengampu matakuliah Pendidikan Hukum dan HAM, pustakawan pelaksana lanjutan Universitas Negeri Padang, pengadministrasi pustaka, mahasiswa PPKn TM 2018, 2019 dan 2020. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder melalui teknik observasi, wawancara serta dengan menggunakan kuesioner dengan informan yang terpilih. Pengujian data dalam penelitian ini melalui teknik analisis regresi sederhana dan uji hipotesis yang digunakan untuk menguji ada tidaknya peranan mata kuliah pendidikan hukum dan HAM dalam mewujudkan kepatuhan hukum peminjaman buku perpustakaan pada mahasiswa PPKn Universitas Negeri Padang. Kemudian menguji kredibilitas faktor penyebab mahasiswa PPKn Universitas Negeri Padang

tidak patuh akan regulasi hukum perpustakaan yaitu menggunakan metode analisis data pada dengan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan kesimpulan.

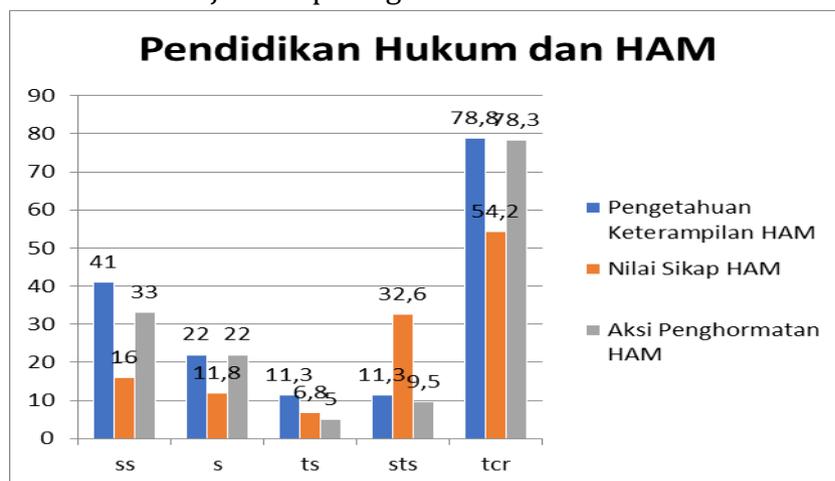
HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Mata Kuliah Pendidikan Hukum dan HAM dalam Mewujudkan Kepatuhan Hukum

Salah satu mata kuliah Universitas Negeri Padang Prodi PPKn membentuk karakter mahasiswa patuh hukum adalah pendidikan hukum dan HAM. Mata kuliah ini dikatakan berperan yang mana dari analisis regresi sederhana $t_{hitung} < t_{tabel}$. Signifikansi pada penelitian, yaitu sebesar 0,001, yang menunjukkan bahwa ia lebih kecil dari tingkat alpha ($0,001 = 0,05$). Dengan menggunakan koefisien determinasi, kita dapat mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat secara persentase. Tabel R Square sebesar 0,203 menunjukkan hasil koefisien determinasi penelitian ini. Angka tersebut menunjukkan bahwa pengaruh mata kuliah pendidikan hukum dan HAM terhadap kepatuhan hukum mahasiswa adalah sebesar 0,203 atau 20,3%, yang menunjukkan bahwa pengaruh antara kedua variabel adalah kategori rendah dengan nilai 0,203. Oleh karena itu, kontribusi mata kuliah pendidikan hukum dan HAM terhadap kepatuhan hukum adalah 20,3 persen dari total.

1) Pemahaman mahasiswa tentang Pendidikan Hukum dan HAM

Pendidikan tinggi lebih mengedepankan aspek kemanusiaan yang mana harus sejalan dengan hukum makna HAM, yaitu harus dengan mengedepankan hak-hak yang dimiliki orang karena martabat kemanusiaannya sendiri. Dalam rangka mengetahui mata kuliah pendidikan ini berperan atau tidaknya bisa dilihat dari pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah pendidikan hukum dan HAM. Mahasiswa dikatakan paham apabila indikator dari mata kuliah sudah terpenuhi Pengetahuan dan Keterampilan HAM, Nilai Sikap HAM, Penghormatan Hak Orang Lain. Hasil penelitian ditunjukkan pada grafik berikut ini.



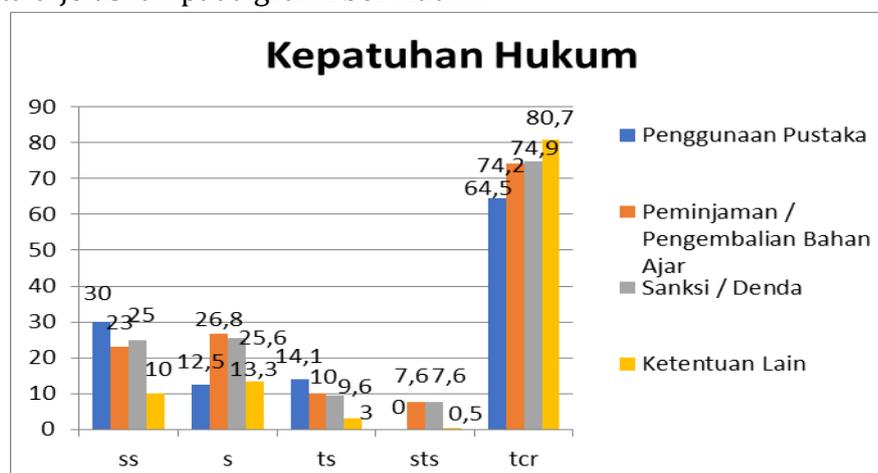
Grafik 1. Pemahaman mahasiswa tentang Pendidikan Hukum dan HAM

Sumber: olahan peneliti

Pada Hasil Tingkat Capaian Responden menunjukkan pengetahuan dan keterampilan HAM mahasiswa Prodi PPKn Universitas Negeri Padang berada pada kategori baik. Responden sebanyak 81 orang, dengan hasil posisi rata-rata Tingkat Capaian Responden 78. Terdapat enam buah butir soal terkait pengetahuan dan keterampilan HAM. Pada Hasil Tingkat Capaian Responden menunjukkan pemahaman Nilai Sikap HAM mahasiswa Prodi PPKn sudah cukup baik. Responden sebanyak 81 orang, berada pada posisi rata-rata Tingkat Capaian Responden 54,2. Terdapat enam buah butir soal terkait pengetahuan dan keterampilan HAM pemahaman Nilai Sikap HAM. Kemudian pada Hasil Tingkat Capaian Responden menunjukkan pemahaman Pendidikan Hukum dan HAM kategori baik. Responden sebanyak 81 orang, berada pada posisi rata-rata Tingkat Capaian Responden 78,3. Terdapat lima buah butir soal terkait pengetahuan dan keterampilan HAM pemahaman Nilai Sikap HAM. Pemahaman mahasiswa terkait mata kuliah pendidikan hukum dan HAM berjalan dengan kategori baik. Hal ini didukung dengan wawancara yang dilakukan kepada Dosen Pengampu Mata kuliah Pendidikan Hukum dan HAM dan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan matakuliah pendidikan hukum dan HAM. Hasilnya mahasiswa memiliki pengetahuan dan keteampilan pada kategori baik, melaksanakan nilai dan sikap HAM kategori cukup baik, dan menghormati hak orang lain kategori baik. Pemahaman pengetahuan mahasiswa tentang pendidikan hukum dan HAM berada pada kategori baik.

2) Pemahaman Mahasiswa tentang Kepatuhan Hukum dalam melaksanakan Regulasi Hukum Perpustakaan Universitas Negeri Padang.

Pendidikan tinggi lebih mengedepankan aspek taat aturan yaitu harus dengan mengedepankan hak-hak dan menjalankan kewajiban dan tanggungjawab dengan baik dan benar. Dalam rangka mengetahui mata kuliah pendidikan ini berperan atau tidaknya bisa dilihat dari pemahaman mahasiswa terhadap kepatuhan hukum. Mahasiswa dikatakan paham apabila melaksanakan regulasi hukum dengan pemanfaatan jasa layanan sirkulasi pustaka yaitu: Pemakaian Pustaka, Peminjaman / Pengembalian Bahan Ajar Pustaka, Denda / Sanksi dan Ketentuan Khusus. Hasil olahan data dijelaskan pada grafik berikut ini.



Grafik 1. Kepatuhan hukum

Sumber: olahan peneliti

Pada Hasil Tingkat Capaian Responden menunjukkan penggunaan pustaka mahasiswa Prodi PPKn Universitas Negeri Padang berada pada kategori baik. Responden sebanyak 81 orang, dengan hasil posisi rata-rata Tingkat Capaian Responden 64,5 Terdapat enam buah butir soal terkait penggunaan pustaka. Pada Hasil Tingkat Capaian Responden menunjukkan pengetahuan dan keterampilan HAM mahasiswa Prodi PPKn berada pada kategori baik. Responden sebanyak 81 orang, dengan hasil posisi rata-rata Tingkat Capaian Responden 74,2. Terdapat enam buah butir soal terkait peminjaman pengembalian bahan ajar. Selanjutnya pada Hasil Tingkat Capaian Responden menunjukkan pengetahuan dan keterampilan HAM mahasiswa Prodi PPKn berada pada kategori baik. Responden sebanyak 81 orang, dengan hasil posisi rata-rata Tingkat Capaian Responden 74,9. Terdapat lima buah butir soal terkait sanksi/denda. Pada Hasil Tingkat Capaian Responden menunjukkan pengetahuan dan keterampilan HAM mahasiswa Prodi PPKn berada pada kategori baik. Responden sebanyak 81 orang, dengan hasil posisi rata-rata Tingkat Capaian Responden 80,7. Terdapat dua buah butir soal terkait ketentuan lain. Pemahaman mahasiswa terkait kepatuhan hukum berjalan dengan kategori baik. Hal ini didukung dengan wawancara yang dilakukan kepada UPT. Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Padang dan mahasiswa yang telah menyelesaikan matakuliah pendidikan hukum dan HAM. Hasilnya mahasiswa memiliki pemahaman pemakaian pustaka, pemahaman peminjaman/pengembalian bahan ajar, pemahaman sanksi/denda, dan pemahaman ketentuan khusus berada pada kategori baik. Maka dapat diartikan disini pemahaman pengetahuan mahasiswa tentang kepatuhan hukum regulasi hukum perpustakaan Universitas Negeri Padang berada pada kategori baik.

3) Penerapan Perilaku Patuh Hukum Mahasiswa

Keberhasilan peranan matakuliah Pendidikan Hukum dan HAM terhadap kepatuhan hukum dapat dilihat perilaku mahasiswa Prodi PPKn. Mahasiswa yang sudah mengambil dan menyelesaikan mata kuliah tersebut telah menerapkan pengetahuan yang didapatkan selama proses perkuliahan. Mahasiswa mengikuti regulasi yang ditetapkan pihak universitas maupun departemen. Mata kuliah Pendidikan Hukum dan HAM memberikan peranan seperti membekali pengetahuan, keterampilan dan tindakan yang mana mahasiswa mudah memahami jika ini hal benar atau salah. Meskipun demikian masih ada satu atau dua orang mahasiswa yang tidak mengindahkan. Namun, tidak menutup hasil secara menyeluruh mahasiswa menerapkan apa yang didapatkan pada mata kuliah pendidikan hukum dan HAM. Mahasiswa sudah paham apa itu hak, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa. Mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah pendidikan hukum dan HAM sudah mengikuti regulasi di kelas dan mengimplementasikan pengetahuan yang didapat di kelas dengan menaati regulasi yang ada seperti mahasiswa tanggungjawab mengembalikan bahan ajar pustaka tepat waktu.

Faktor penyebab mahasiswa tidak patuh regulasi hukum perpustakaan pusat Universitas Negeri Padang

Adapun yang menyebabkan mahasiswa tidak patuh regulasi hukum perpustakaan terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Dimana kedua faktor ini kelalaian dan kurangnya rasa tanggungjawab dari pemustaka dan pustakawan. Faktor utama yang menyebabkan ketidak patuhan hukum ini adalah faktor internal. Dari internal mahasiswa memiliki sikap lalai, malas, lupa dan tidak bertanggung jawab mahasiswa merupakan pengaruh yang menyebabkan mahasiswa terlambat mengembalikan bahan ajar pustaka tepat waktu yang dilakukan oleh informan mahasiswa terlambat mengembalikan bahan ajar pustaka akibat diri sendiri yang tidak bertanggungjawab akan kewajibannya sebagai mahasiswa. Mahasiswa pun tidak takut akan denda / sanksi yang ditetapkan oleh perpustakaan Universitas Negeri Padang.

Dari eksternal yaitu perpustakaan lah yang menyebabkan mahasiswa terlambat mengembalikan bahan ajar pustaka yaitu karena koleksi perpustakaan yang tidak memadai dan sirkulasi peminjaman yang ribet. Koleksi perpustakaan terbatas, aturan pemakaian buku pustaka tidak bisa diperpanjang lebih dari 3 kali dengan buku dan judul yang sama. Mahasiswa yang masih membutuhkan koleksi pustaka tersebut memperpanjang koleksi tersebut dengan rela membayar denda koleksi yang tidak dikembalikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peranan matakuliah pendidikan hukum dan HAM dalam mewujudkan kepatuhan hukum (peminjaman buku pustaka) mahasiswa prodi PPKn Universitas Negeri Padang. Ini dapat dilihat dari angket yang disebar dan wawancara yang dilakukan. Mata kuliah Pendidikan Hukum dan HAM berperan menyokong adanya pembekalan pemberian pengetahuan dan keterampilan saat proses perkuliahan berlangsung, mahasiswa mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka dapatkan.

Pendapat di atas sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Menurut Julie McLeod dan Ruth Reynolds (2010), pendidikan hukum dan hak asasi manusia bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap hukum dan hak asasi manusia melalui pembelajaran tentang hukum, hak, dan melalui pembelajaran tentang hukum, hak. Pendidikan hukum dan hak asasi manusia terkait erat dengan pendekatan pengajaran. Ini membutuhkan pengetahuan tentang hukum dan hak asasi manusia tetapi juga menerapkan pedagogi berbasis hukum dan HAM untuk memastikan kaum muda belajar di lingkungan yang menghargai hak lingkungan yang menghormati hak mereka dan mempromosikan hak orang lain. Hasil yang didapatkan yakni sejalan dengan teori yang digunakan yakni mahasiswa Prodi PPKn Universitas Negeri Padang yang mana mahasiswa sudah menjalankan pengetahuan hukum dan HAM, serta menerapkan sikap dan perilaku HAM dan aksi penghormatan orang lain.

Kemudian untuk melihat mahasiswa mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan pendidikan hukum dan HAM bisa dilihat mahasiswa patuh hukum. Patuh hukum disini mahasiswa mengikuti regulasi hukum Universitas Negeri Padang yang mana dapat dilihat dari regulasi hukum perpustakaan. Soerjono, Salman (1982; 156) mengatakan kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang menghasilkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang ditetapkan dalam kehidupan sosial. Menurut Ronny Hadityo Soemitro, 1980. Adapun indikator kepatuhan hukum yaitu: penerimaan, identifikasi dan internalisasi. Dengan mempertimbangkan indikator regulasi pemanfaatan layanan sirkulasi perpustakaan. (Syahabuddin Qaiyub :2007). Adapun yaitu: pemakaian pustaka, peminjaman dan pengembalian, denda / sanksi dan ketentuan khusus. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Syahabuddin Qaiyub, regulasi perpustakaan harus dijalankan agar bisa dikategorikan patuh hukum maka indikator kepatuhan hukum harus terlaksana. Kepatuhan hukum yang dijalankan mahasiswa Prodi PPKn Universitas Negeri Padang terlaksana.

KESIMPULAN

Matakuliah pendidikan hukum dan HAM berperan dalam mewujudkan kepatuhan hukum mahasiswa PPKn UNP. Hasil analisis regresi sederhana $t_{hitung} < t_{tabel}$. Sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari tingkat alpha ($0,001 < 0,05$). Pada penelitian tabel R Square sebesar 0,203. Angka tersebut mengandung arti bahwa pengaruh peranan matakuliah pendidikan hukum dan HAM berkontribusi terhadap kepatuhan hukum ialah $0,203 \times 100\% = 20,3\%$ dan selebihnya dipengaruhi faktor lain. Hasil data tersebut diperkuat dengan wawancara yang peneliti lakukan kepada responden yang sudah mengambil matakuliah pendidikan hukum dan HAM, responden terpilih mengatakan bahwa setelah mempelajari matakuliah pendidikan Hukum dan HAM mereka mengamalkannya. Dengan hasil tersebut, hipotesis yang penulis ajukan diterima. Namun demikian masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mahasiswa tidak patuh akan regulasi hukum perpustakaan UNP disebabkan oleh dua faktor: faktor internal berasal dari pemustaka yang menjadi cikal bakal keterlambatan koleksi, diantaranya: malas, lupa, lalai. Faktor eksternal dari dalam pustaka sendiri, seperti: koleksi yang tidak memadai, sirkulasi yang ribet.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, B. (2014). Pendidikan Tinggi Hukum & Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia
- Aminullah, A. (2018). Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM). *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 3(3), 5-19.
- Angraini, R., Ersya, M. P., Irwan, I., & Luthfi, Z. F. (2018). Meningkatkan Kesadaran Hukum melalui Pembelajaran Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi. *Journal of Civic Education*, 1(3), 297-308.
- Apriandhini, M., Santi, Y., & Widhi, E. N. (2021). Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di UPBJJ UT

- Samarinda. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, 1(1), 75-83.
- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12-25
- Arliman, L. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish.
- Basri, S. H., Hendrawati, H. E. N. I., & Sh, M. H. (2019). Pendidikan Hukum Indonesia Yang Berorientasi Pada Nilai-Nilai Pancasila Dalam Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal PPKn & Hukum Vol*, 14(1), 49
- Budijanto, O. W., & Rahmanto, T. Y. (2021). Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ham*, 12(1), 57
- El Muhtaj, M., Siregar, M. F., Pa, R. B. B., & Rachman, F. (2020). Literasi hak asasi manusia dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. *Jurnal Ham*, 11(3), 369
- Galand, P. B. J., & Dewi, D. A. (2021). Pendidikan Hukum dan Pendidikan Nilai Dalam Mewujudkan Warga Negara yang Baik dan Cerdas melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 3
- Itasari, E. R. (2021). Kepatuhan Hukum Negara Indonesia Terhadap Icescr. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 414-422
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.
- Suparman, H. A. (2015). Pendidikan Hukum Humanistik. *Jurnal Wawasan Hukum*, 32(1), 52.